

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Manajemen komunikasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dalam relokasi dan rehabilitasi pasca bencana Merapi untuk mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana telah dilakukan dengan baik yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap identifikasi risiko bencana untuk mengetahui risiko bencana yang terjadi, perencanaan dilakukan berdasarkan risiko bencana yaitu ditetapkannya wilayah KRB III sebagai daerah yang bebas hunian, tahapan strategi komunikasi dilakukan melalui komunikasi berbagai arah dan terintegrasi melalui dialog dengan warga masyarakat untuk mau direlokasi ke lokasi hunian tetap.
2. Kebijakan relokasi dan rehabilitasi warga di wilayah KRB III adalah kebijakan pemerintah pusat dalam menyikapi ancaman bencana Gunung Merapi yang argumentasinya pada peraturan perundang-undangan, pertimbangan ilmiah dan iptek kegunungapian. Sedangkan warga yang menolak relokasi mendasarkan sikapnya pada kearifan lokal, sistem nilai dan sosio kultural serta naluri dan pengalaman dalam memahami Gunung Merapi. Manajemen komunikasi yang dilakukan adalah dengan dialogis dan mendasarkan diri pada keteguhan pendirian dan kekuatan argumentasi. Pemerintah Kabupaten Sleman akhirnya melakukan diskresi kebijakan untuk mengakomodasi aspirasi
..... menolak kebijakan relokasi yaitu dengan konsep living in harmony

adalah titik kesepakatan antara hasil diskresi kebijakan dan kekuatan argumentasi warga. Namun warga pun tahu diri untuk tidak menuntut banyak dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai konsekuensi dari pilihan bersama mereka. Mereka pun sadar untuk bersiap diri ketika erupsi kembali terjadi di masa datang dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam menanggulangi bencana, baik dengan memanfaatkan ilmu dan peralatan modern maupun dengan memperkuat kearifan atau pengetahuan lokal mereka.

B. Saran

1. BPBD sebagai Badan di daerah yang mempunyai kewenangan dalam penanganan bencana diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam dialog, lobby, mediasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui rekrutmen pegawai atau melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah terkait bencana di Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya tidak memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat untuk merelokasi warga merapi tetapi juga harus mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat. Kebijakan pemerintah di masa datang kiranya perlu untuk lebih partisipatoris, termasuk mengakomodasi kearifan lokal. Dengan demikian, kebijakan akan akseptabel dan implementasinya akan lebih mudah dilakukan. Kebijakan perlu dilakukan dengan mengkombinasikan aspek proses prosedural dan yuridis-formal dengan aspek substantif dan informal agar banyak hal yang berkembang pada

komunitas warga dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan publik.

3. BPBD Kabupaten Sleman diharapkan meningkatkan sistem informasi manajemen bencana dengan memberikan informasi, pedoman yang tidak sebatas berpijak kepada peraturan saja, tetapi juga kebijakan yang fleksibel, sehingga penanganan korban bencana bisa berjalan dengan lebih baik dan korban dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dukungan teknologi komunikasi yang seiring dengan kekuatan nilai sosial kultural masyarakat yang bermanfaat untuk menangani bencana alam.
4. Fokus penelitian ini hanya dilakukan terhadap manajemen komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman dalam relokasi dan rehabilitasi pasca bencana Merapi untuk mengurangi risiko bencana, jadi diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait bencana di Kabupaten